

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI MELALUI KEBIJAKAN NON
PENAL**

INTISARI

Oleh:

Andrian Prasetyo¹, Supriyadi²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai upaya BNN Kabupaten Sleman dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melalui kebijakan non penal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Sleman dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melalui kebijakan non penal.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian empiris sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif dan hasil penelitian kemudian dipaparkan dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat dua kesimpulan sebagai jawaban dari dua rumusan masalah. Pertama, upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melalui kebijakan non penal yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dilakukan oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan program DIPA dan program Non DIPA. Kedua, dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melalui kebijakan non penal, BNN Kabupaten Sleman menghadapi beberapa kendala yakni kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personil, keterbatasan waktu dan luasnya wilayah hukum BNN Kabupaten Sleman.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika, upaya penanggulangan, kebijakan non penal, badan narkotika nasional.

¹ Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***THE ROLE OF BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
IN OVERCOMING THE CRIME OF NARCOTICS ABUSE FOR PERSONAL
USE THROUGH NON PENAL POLICIES***

ABSTRACT

By:
Andrian Prasetyo¹, Supriyadi²

This study aims to find out and explain the efforts of the Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman in dealing with the crime of narcotics abuse for personal use through a non-penal policy. This study also aims to find out and explain the obstacles faced by the Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman in an effort to tackle the crime of narcotics abuse for personal use through a non-penal policy.

This legal research was carried out using empirical research methods so that in practice was carried out by conducting interviews with respondents from the Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Data analysis from this study was carried out using qualitative analysis and the results of the research were then presented using a descriptive method.

Based on the results of the research that has been done, two conclusions have been obtained as answers to the two problem formulations. First, efforts to deal with criminal acts of narcotics abuse for personal use through non-penal policies carried out by the Sleman Regency National Narcotics Agency are carried out by the prevention and community empowerment sector by implementing the DIPA program and the Non-DIPA program. Second, in an effort to tackle the crime of narcotics abuse for personal use through a non-penal policy, the Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman faces several obstacles, namely the lack of public awareness, limited personnel, limited time and the size of the legal territory of the Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

Keywords: narcotics abuse, prevention efforts, non penal policies, Badan Narkotika Nasional

¹ Undergraduate Student, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada